

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

Pemerintah Bantah Adanya Tekanan Asing

JAKARTA— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menegaskan, kesepakatan antara PT Pertamina (Persero) dan ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) adalah murni penyelesaian secara korporat dan tidak ada kaitan sama sekali dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Condoleezza Rice ke Indonesia.

Purnomo mengatakan hal itu sebelum membuka seminar bertajuk Investasi Sektor Pertambangan yang diselenggarakan *Investor Daily* di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (14/3). "Saya kira tidak ada kaitannya. Itu penyelesaian yang dilakukan secara korporat yang dilakukan Pertamina dan EMOI, jadi itu solusi korporat dari kedua pihak," katanya menanggapi hasil akhir perundingan Blok Cepu.

Purnomo mengatakan, pemerintah memang bisa sebagai panitia pengarah dalam proses tersebut. Namun karena dalam proses mencapai kesepakatan berjalan dengan baik, pemerintah tidak menjalankan tugas itu. "Tugas baru dilakukan jika terjadi stagnasi dalam proses pendekatan *business to business* secara korporat," katanya.

Mengenai Pertamina yang ternyata telah melakukan *farm out* sebesar 50% kepemilikannya pada EMOI senilai US\$ 400 juta, Purnomo mengatakan, angka itu adalah bentuk kompensasi yang diterima Pertamina.

Hal yang sama dikemukakan

"Tidak ada yang menang atau yang kalah dalam Blok Cepu. Bukan berarti Exxon akan mengontrol semuanya. Keputusan harus diverifikasi dan dikontrol oleh pemerintah,"

● Ari H Soemarno, Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Menneg BUMN Sugiharto. Bahkan dia mengaku tidak mengetahui rencana kedatangan Rice. "*Masya Allah*. Saya tidak tahu menlu AS mau datang. Saya tidak tahu sama sekali. Tidak pernah satu pun yang mempengaruhi saya," cetus Sugiharto.

Sugiharto juga meyakini keputusan soal Blok Cepu ini tidak akan memberi dampak pada keuangan

Pertamina saat ini. Dia menambahkan, ExxonMobil tak bisa berbuat semau-maunya, karena tak punya hak prerogatif di Blok Cepu.

Dia menjelaskan, di Blok Cepu, posisi tertinggi diduduki oleh Joint Operation Committee (JOC) atau Komite Operasi Bersama dengan Pertamina sebagai ketua. "GM tidak punya satu pun prerogatif. Tanpa ada persetujuan dari JOC, satu dolar pun tidak bisa dikeluarkan. JOC itu komposisinya 50:50 dan ketuanya Pertamina, dan disana ada *balancing power*, mayoritas orang Indonesia duduk disitu," tegas Sugiharto.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari H Soemarno juga menegaskan, Pertamina masih memegang kendali dalam pengelolaan Blok Cepu. Ari menyatakan, pihaknya tetap berkomitmen mengendalikan Blok Cepu.

"Jadi *nggak* ada yang menang atau yang kalah. Bukan berarti PT ExxonMobil Oil Indonesia akan kontrol semuanya. Keputusan ini pun harus diverifikasi dan dikontrol oleh pemerintah," cetus Ari.

IAGI Menyesalkan

Juru Bicara Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) Abdul Mutalib Masdar menyesalkan kesepakatan yang dicapai dalam pengelolaan Blok Cepu. Menurut Masdar, kesepakatan itu tidak mencerminkan proporsi yang maksimal untuk tenaga ahli Indonesia dalam menduduki posisi

kunci. "Apalagi, adanya organisasi *general manager* dan deputi serta manajer dan wakil manajer tidak lazim dikenal dalam dunia perminyakan," ujar Masdar.

Menurut dia, maksimalisasi tenaga kerja Indonesia bukan hanya pada level teknis pelaksana, tapi juga keterlibatan pada level finansial, manajerial dan bidang-bidang penunjang lainnya.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, pengawasan terhadap pengoperasian Blok Cepu oleh Exxon-Mobil harus dilakukan dengan ketat.

Terkait dengan rencana akan diajukannya hak angket oleh Fraksi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Agung mengatakan dirinya akan mengacu pada hasil rapat Komisi VII (bidang energi sumber daya mineral).

Anggota Komisi VI Dradjad Wibowo juga menyesalkan keputusan penetapan ExxonMobil sebagai operator di Blok Cepu. Proses penentuan operator Blok Cepu secara *business to business*, menurut dia adalah upaya pemerintah untuk buang badan. Bahkan, ia telah mengingatkan Ari Soemarno tentang konsekuensi hukum di kemudian hari. **(lan/ari/imm/est)**

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR-DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

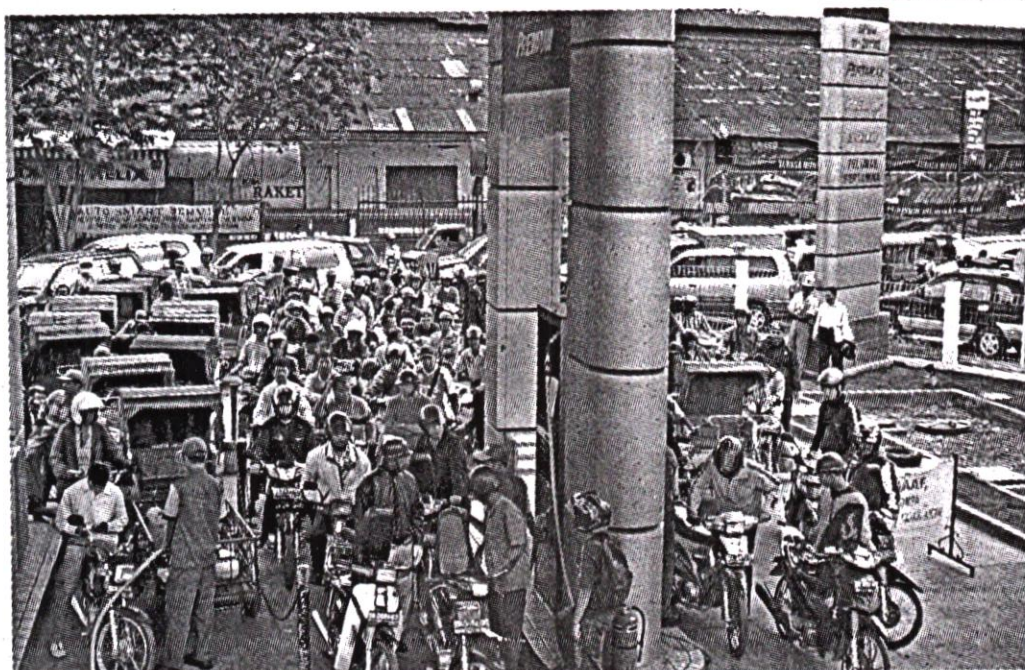
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1. 18

TAHUN 2006



HAMBALI BATUBARA (TEMPO)

LANGKA. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium terjadi di Kota Medan sejak Senin malam lalu hingga kemarin. Akibat kelangkaan premium, pemilik kendaraan bermotor terpaksa antre untuk mendapatkan bahan bakar. Kelangkaan terjadi karena kesalahan pengiriman dari Depot Dumai ke Labuan Deli, Belawan, Sumatera Utara.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A.9

TAHUN 2006

Bensin Langka Akibat Salah Informasi

MEDAN — Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Medan, Sumatera Utara, kehabisan stok. Kelangkaan bahan bakar bensin yang berlangsung sejak Senin hingga kemarin itu akibat kesalahan informasi pengiriman pasokan oleh petugas di depot Dumai.

Menurut juru bicara Pertamina Wilayah I Sumatera Utara, Joko Sasono P., kelangkaan itu disebabkan oleh adanya kendala teknis pengiriman dari depot Pertamina di Dumai. "Ada masalah pada skedul pengiriman," kata Joko kemarin.

Dia menjelaskan, kendala teknis yang dimaksud adalah kesalahan informasi permintaan pengiriman. Permintaan premium dari Pertamina Medan kepada petugas depot Dumai ternyata bukan bensin yang dikirim, tapi solar dan minyak tanah. Padahal stok solar di Labuhan Deli dan Belawan cukup banyak, sekitar 20 ribu ton.

Permintaan bensin langsung dilayangkan. Namun, karena perjalanan kapal memakan waktu

cukup lama, krisis bensin di Medan tak segera teratasi. Mestinya, menurut Joko, kapal masuk Medan pada Minggu lalu, tapi terlambat merapat di Labuhan Deli hingga Senin malam.

"Stok bensin waktu itu sudah sangat menipis, cuma sekitar 2.000 ton. Tak mungkin premium ini didistribusikan ke pompa bensin di seluruh Medan," ungkap Joko seraya menambahkan telah meminta tambahan pasokan bensin dari Riau dan Pontianak.

Berdasarkan pantauan *Tempo*, sedikitnya 5 stasiun pengisian bahan bakar umum kehabisan stok. Beberapa pompa bensin yang masih menjual premium diserbu pembeli dan mengakibatkan antrean panjang.

Andi Ginting, pengawas pompa bensin di Jalan Gajah Mada, mengaku sudah mengirim dua truk tangki untuk antre premium di depot Belawan. Ginting terpaksa tidak melayani pembelian bensin kepada pelanggannya sejak Senin malam lalu. ● HAMBALI BATUBARA

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 2		TAHUN 2006

Govt denies U.S. pressured for Cepu deal

The Jakarta Post
Jakarta

Ministers scrambled Tuesday to deny suspicions about the timing of the agreement between state oil and gas firm PT Pertamina and U.S. oil giant ExxonMobil Corp., contending it was not due to pressure from the U.S. government and that the deal would benefit the country.

"I swear no one put pressure (on the government) regarding this issue," said State Minister of State Enterprises Sugiharto.

"It has nothing to do with that," he added, responding to allegations the agreement, made Monday on the eve of U.S. Secretary of State Condoleezza Rice's visit to Jakarta, was a "gift" to Washington.

The deal ended the prolonged four-year dispute between Pertamina and ExxonMobil over the operatorship of the rich Cepu oil block.

Under the agreement,

expected to be officially signed Wednesday, Pertamina and ExxonMobil agreed to form a joint-operating organization for the day-to-day operation of the Cepu block. ExxonMobil was given the main post of general manager, while Pertamina was made deputy general manager.

Several legislators said the deal would cause losses to the state and was a blow to Pertamina, whose previous management had insisted on the operatorship role. The agreement came a week after the government reshuffled the top management of Pertamina.

Sugiharto said the agreement would ensure the interests of the state, pointing out that although ExxonMobil held the general manager post, it would be supervised by a joint operating committee chaired by Pertamina.

The committee will be in charge of making key decisions, approving budgets and supervising operations, he said.

Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yudiantoro said the decision was a business-to-business deal of the companies, and was made without intervention from the government.

Newly installed Pertamina president Ari Soemarno also said the decision had nothing to do with the arrival of Rice.

"The negotiation has taken so long, almost five years," Ari told reporters. "Our team has met about 31 times this year only. The decision was taken on a business-to-business basis without government interference."

The Cepu block, located on the border between East Java and Central Java, is estimated to have oil reserves of about 500 million barrels. It is expected to start commercial production in 2008, and could have daily output of 165,000 barrels per day, or around 20 percent of the country's oil output.

Its development is seen as crucial to help reverse

the country's declining oil production.

"I see this as a business-to-business deal that is beneficial to both sides," Kurtubi, an oil and gas analyst with the Center for Petroleum and Energy Economic Studies, told *Agence France-Presse*.

"This decision has ended a long dragged out deadlock and will clearly carry a positive impact on the investment climate here, especially in the oil and gas sector."

Agusman Effendy, a lawmaker of the Golkar Party, also supported the deal.

"Most important is that the Cepu block can produce as soon as possible, we should not lose the momentum," said the chairman of the House Energy Commission.

Another commission member, Tjatur Sapto, attacked the deal.

"We'll take every means, including legal and political measures, to fight the decision," Tjatur of the National Mandate Party faction said.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14	15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31								
HALAMAN : 1											TAHUN 2006

MENTERI SUGI BANTAH BERI HADIAH KE AMERIKA Yang Neken Blok Cepu Mau Dilaporin Ke KPK

Jakarta, RM. Keputusan pemerintah yang memenangkan ExxonMobil untuk mengelola Blok Cepu berbuntut panjang. Keputusan tersebut tidak hanya digugat, tapi juga akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR dari F-PPDIP Emir Moeis mengatakan, keputusan pemerintah tersebut bahkan bakal jadi bom waktu dan bisa meledak kapan saja, karena di dalamnya sarat dugaan KKN. Yakni, sejak pengalihan kontrak TAC dari PT Humpus Patragas kepada Ampolex (perusahaan Australia) serta dari Ampolex ke ExxonMobil, sampai penunjukan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu.

"Kalaupun tidak meledak sekarang, akan meledak di kemudian hari atau pada saat sesudah terjadi pergantian pemerintahan. Makanya, para pihak yang terlibat penandatangan masalah Cepu, siap-siap saja nanti diperiksa di Gedung Bundar," kata Emir di Jakarta, kemarin.

Emir yang ditemani anggota Komisi VII DPR dari FPDI-P Zaenal Arifin akan melaporkan dugaan korupsi tersebut ke KPK. Ia pun mengaku sudah janji dengan Wakil Ketua KPK Erry Ryana Hardjapamekas untuk

menyampaikan laporan itu.

"Kedatangan saya ke KPK untuk menyampaikan laporan hasil Pansus Pertamina yang di dalamnya ada dugaan KKN dalam kasus Blok Cepu. Sebenarnya, laporan ini sudah kita serahkan ke pemerintah pada 2003 yang lalu, tetapi kejaksan masih enggan untuk memprosesnya, sehingga akhirnya kami laporkan ke KPK untuk segera ditindaklanjuti," tegas Emir Moeis.

Sementara anggota Dewan Harian Na-

sional 45 Pandji Hadianto -mewakili komponen masyarakat Indonesia yang menolak keputusan pemerintah menyerahkan hak operator ke ExxonMobil mengatakan, pemerintah Indonesia akan digugat rakyatnya sendiri.

Sementara Menneg BUMN Sugiharto membantah kesepakatan kerjasama operasi Blok Cepu antara PT Pertamina dengan perusahaan minyak Amerika Serikat ExxonMobil Oil Indonesia, terkait dengan kedatangan Menlu

Condoleezza Rice ke Indonesia.

Sekjen Ikatan Cendekiawan Demokrat Indonesia '45 itu melanjutkan, sekalipun sudah dapat diduga hak intepelasi dan hak angket akan kandas ditengah jalan, namun upaya itu tetap dilakukan.

Soal alasan pemerintah bahwa perundingan Exxon dan Pertamina dilakukan *bussiness to bussiness* juga digugat. "Faktanya, Pertamina tidak leluasa dalam bernegosiasi. Kaki dan tangannya malah diikat," ujar Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu Marwan Batubara di Jakarta, kemarin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pihak Exxon dalam satu minggu siap melakukan pekerjaan di Blok Cepu. "Mereka sudah siap sejak September. Peralatannya disimpan di Singapura," kata Kalla di kantor Wapres, kemarin.

Dengan masuknya Exxon, kata Kalla, akan ada transfer teknologi, karena kita memang belum siap. Kalau pun tidak kerjasama dengan Exxon, kita nanti juga akan menggunakan peralatan dari perusahaan asing," kata Kalla yang menolak kalau Exxon disamakan dengan Freeport. ■ HPS/WIN/IU/MAF

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 2										TAHUN 2006	

DI BALIK KEPUTUSAN PEMERINTAH MEMILIH EXXON Rakyat Layak Curiga

Jakarta, RM. Dalam keputusan pembentukan General Manager Blok Cepu yang akhirnya jatuh ke tangan ExxonMobil, SBY sukses dijebak. Begitu kata Fuad Bazazier, bekas menteri keuangan era Soeharto. Menurut dia, rakyat layak curiga ada kekuatan uang di balik keputusan itu.

Siapa yang ingin menjebak SBY? Menurut bekas anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, yang memasang jebakan adalah kelompok yang sedang dan akan bersaing dengan SBY di tahun 2009.

Tujuan kelompok ini, kata Fuad, tiada lain adalah untuk menggerogoti kekuatan SBY dan menjatuhkan nama baik SBY di hadapan rakyat banyak.

Selain agar rakyat dibikin marah, keputusan SBY memilih Exxon sebagai operator Blok Cepu akan membuka pintu bagi DPR untuk mengajukan hak angket sebagai langkah menuju *impeachment*," katanya.

Kalaupun gagal di-*impeach*, tambah Fuad, hasil minimalnya SBY tidak akan dipilih lagi dalam pemilu 2009 karena sudah mendapat cap antek Amerika, tidak nasionalis, sudah terima komisi, KKN dan lain-lain.

Kadaan seperti ini, ujarnya, akan mengulang nasib bekas Presiden Megawati Soekarnoputri yang pamornya melorot di mata rakyat karena menjual aset BUMN, seperti Indosat.

"Setelah Cepu diberikan ke Exxon, saya menduga akan ada gelombang demo yang besar. Bahkan, rakyat akan menyatakan mosi tidak percaya kepada SBY. Apalagi, kalau pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tarif dasar listrik (TDL)," terangnya.

Keputusan pemerintah menyerahkan Cepu ke Exxon, sambungnya, menunjukkan wajah pemimpin bangsa yang inlander. Yang lebih disayangkan Fuad, sampai detik ini, tidak ada pejabat di lingkaran Istana yang be-

rani secara *gentle* unjuk gigi mendukung Exxon.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Demokrat, Marzuki Alie mengatakan tidak mungkin rakyat akan marah ke SBY gara-gara memilih Exxon ketimbang Pertamina sebagai operator Blok Cepu.

"SBY tentu mempunyai dasar bagaimana kinerja Pertamina saat ini. Harus diakui, kondisi minyak kita ini kan *made importir*. Kebutuhan lebih banyak dibanding hasil produksinya. Makanya, diperlukan langkah yang segera mungkin untuk menutupi hal itu," kata Marzuki.

Dia menambahkan, sebetulnya bisa saja dipaksakan diberikan ke Pertamina untuk mengelola Blok Cepu, tapi katanya masih perlu waktu.

"Yang jelas, ini bisnis *to* bisnis. Bukan persoalan nasionalis dan tidak nasionalis. Kita harus berfikir rasional," tandasnya. ■ RCH

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 3												TAHUN 2006																		

11 Kasus KKN di Pertamina

Pansus DPR Minta KPK Ambil Alih

Pansus dibentuk karena adanya laporan dari Pertamina kepada Kejaksaan Agung.

JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) Penyelidikan DPR terhadap kasus indikasi KKN di Pertamina meminta Komisi Pembantasan Korupsi (KPK) mengambil alih 11 kasus yang macet penanganannya di Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami meminta KPK mengambil alih kasus yang *mandek* penanganannya di Kejagung. Ada 11 kasus dengan nilai total kerugian negara sebesar 13 miliar dolar AS," kata Ketua Pansus I Emir Moeis usai menyampaikan permintaan dari Pansus Pertamina DPRRI ke pimpinan KPK, di Gedung KPK, Selasa (14/3).

Sebelas kasus itu di antaranya adalah kasus Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina

KASUS YANG DIREKOMENDASIKAN PANSUS DPR

- Kasus Technical Assistance Contract (TAC)
- Proyek Exxon-I Balongan
- Kasus Petra Oil
- PIPANISASI Jawa yang melibatkan PT Triharsa Bimanusa Tunggal
- Kasus pembangunan pipa gas di Jawa Timur oleh PT Trans Javagas Pipeline
- Kasus PT Tugu Pratama Indonesia
- Arbitrase PT Karaha Bodas Company
- Kasus PT Ariosentrowijoyo
- Kasus TAC Blok Cepu
- Kasus PT Panutan Selaras
- Kasus pipa tanpa kampuh PT Seamless Pipe Indonesia Jaya

dan PT Ustraindo dengan kerugian negara hingga 23 juta dolar AS. Kasus tersebut telah dihentikan penyidikannya di Kejaksaan Agung.

Kasus lain adalah dugaan korupsi pada proyek Exxon-I Balongan, Kasus Perta Oil, Kasus pipanisasi Jawa, Kasus pipa tanpa

Kampuh, pipa Gas Jawa Timur, Kasus PT Tugu Pratama Indonesia, Kasus PT Ariosetowijoyo, Kasus PT Panutan Selaras; kasus proyek TAC Blok Cepu dengan PT Humpuss Patragas dan kasus tuntutan Arbitrase Karaha Bodas Company (KBC).

Menurut Emir, pansus Pertamina DPR dibentuk mengingat adanya laporan dari Pertamina kepada Kejaksaan Agung pada 2001 tentang adanya 159 kasus dalam tubuh Pertamina yang berindikasikan KKN.

Setelah dilakukan penelitian oleh Kejagung, maka hanya ditemukan 23 kasus yang memiliki indikasi adanya KKN. Dan, ketika dilakukan penyidikan yang lebih mendalam, dari 23 kasus itu Kejagung hanya menemukan delapan buah kasus yang memiliki bukti awal yang cukup tentang indikasi tindak pidana korupsi. DPR pada 27 September 2001 membentuk panitia khusus untuk mengadakan penyelidikan terhadap kasus-kasus KKN di Pertamina dengan sasaran proyek Balongan tahun 1995 hingga 1997, proyek lapangan Bu-

nyu, lapangan Pendopo, Prabumulih, Jatibarang, serta kasus Petro-Oil Trading, proyek bantuan teknis Tri Harsa Bimanusa Tunggal dan proyek pipa tanpa kampuh. "Dari beberapa kasus yang dinyatakan tidak ada penyimpangan oleh Kejagung, pansus justru menemukan adanya masalah seperti dalam kasus Tugu Pratama," kata Emir.

Menurut Emir, laporan penelitian Pansus telah diserahkan kepada Wakil Ketua KPK Erry Ryana Hardjapamekas yang berjanji akan segera menindaklanjuti kasus tersebut.

Sementara itu kepada pers, menanggapi permintaan pansus ini, Erry mengatakan permintaan pansus akan ditelaah dan dipelajari oleh KPK. ■ wed

Fakta Angka

13 miliar dolar AS

Total nilai kerugian 11 kasus di Pertamina yang diselidiki oleh Pansus DPR

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2006

ExxonMobil leads Cepu

It is unpopular to stand up in favor of big business, let alone a foreign oil giant such as ExxonMobil, and politicians do not like to take unpopular actions. But it was managerial leadership, not politics, the new president of state oil company Pertamina, Ari Soemarno, demonstrated when he agreed to allow ExxonMobil to lead the daily management of the oil-rich Cepu block in East Java.

Soemarno's decision Monday to accept a Pertamina-ExxonMobil joint operation of Cepu, resolving a dispute that had blocked the development of the oil field for more than four years, was the best option for the country's interests.

The Pertamina chief was right in observing the Cepu oil field must be developed as soon as possible for the sake of national interests and, given Pertamina's current condition and capacity, ExxonMobil is at this point the best choice for accomplishing this.

The country, already a net oil importer, desperately needs to develop the Cepu block, which is estimated to be capable of generating 170,000 barrels of oil a day (bpd). This is quite significant given national capacity is currently less than one million bpd.

It would have been better if Pertamina could have been appointed to lead the day-to-day operations of the block, because the state company and ExxonMobil each hold a 45 percent stake in Cepu under a 30-year production sharing contract, with the remaining 10 percent owned jointly by the Central and East Java administrations.

But as a 28-year career executive of Pertamina, Soemarno is the best judge of the company's true capacity. Pertamina should magnanimously concede that it still lags behind the American oil giant in terms of technology, financial resources, managerial expertise and experience in production development. And the fact of the matter is that the country urgently needs to bring the Cepu field onstream.

Moreover, unlike the usual production sharing contracts (PSCs), the PSC for the Cepu block has been hailed as a model for looking after the country's interests. The production split will be based on a new, innovative arrangement whereby the government will take 85 percent of the output and the contractor 15 percent if global oil

prices average over US\$45/barrel, and 70:30 if oil prices average below \$35/barrel. Based on this sharing agreement, ExxonMobil's take will range from 6.75 to 13.50 percent, depending on global oil prices.

Surrendering the daily management of Cepu to ExxonMobil does not mean giving the American company a blank check to exploit our natural resources. Pertamina, with an equal equity holding to ExxonMobil, is represented on the daily management board and on the supervisory board (Joint Operating Committee). So are the Central and East Java administrations.

Cost control at Cepu is vital because the government's take (share) of the oil field is based on output after the costs are recovered. The field's cost recovery can be managed properly without Pertamina being in charge of the day-to-day management of the field's operations because the management board is only authorized to implement the work and budget plans that have been approved by the Joint Operating Committee.

The most important thing is for Pertamina to appoint highly capable executives as its representatives on the management and supervisory boards so it can effectively see to it that the development and operations of the Cepu field are as efficient as possible and the transfer of managerial expertise and technology from ExxonMobil to Pertamina is smooth.

Apart from direct supervision through Pertamina's direct participation in the management and supervisory boards, the government has another tool to oversee oil contractors — BP Migas, the government agency in charge of supervising the implementation of all oil and natural gas PSCs.

All production sharing contracts, including Pertamina-ExxonMobil, in oil and natural gas must have their annual work and spending plans approved by BP Migas. This upstream oil supervisory body is responsible for determining what expenditures can be counted as expenses for oil and gas production operations.

In the end it was managerial leadership, not politics, that was needed to resolve the Pertamina-ExxonMobil dispute, which had blocked the Cepu oil field development for more than four years. And that was precisely what Soemarno, presumably with the prior approval of the government, as the owner of Pertamina, offered.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2006

JAKARTA (Media): Indonesia masih memegang kendali pengelolaan Blok Cepu meskipun Exxon Mobil bertindak sebagai manajer umum. Sebab, 55% saham Proyek Cepu dipegang pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Direktur Utama PT Pertamina Ari H Sumarno menjelaskan posisi Exxon Mobil di puncak struktur Organisasi Proyek Cepu (OCP) tidak menghilangkan kewenangan kendali pemerintah. Pengeluaran-pengeluaran dalam pengelolaan Proyek Cepu tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

"Proyek Cepu itu 45% saham milik pemerintah pusat dan 10% pemerintah daerah. Jadi, kepemilikan saham 55% di tangan pemerintah. Pengeluaran harus diverifikasi pemerintah. Kalau tidak di-

setujui, tidak dikeluarkan," tegasnya usai acara pemberian penghargaan Dharma Karya Pertambangan dan Energi di Jakarta, kemarin.

Ari menyatakan setelah penandatanganan keputusan bersama (*joint operating agreement*/JOA) dan kesepakatan organisasi Cepu (*Cepu organization agreement*/COA) yang dilakukan hari ini, Komite Operasi Bersama akan menyelesaikan perencanaan pengembangan (*plan*

of development /PoD). Perencanaan tersebut mencakup rencana anggaran termasuk struktur pendanaan Proyek Cepu.

Di tempat terpisah, Menteri ESDM Poernomo Yusgiantoro membantah adanya tekanan pemerintah dalam kesepakatan kerja sama dengan Exxon Mobil. Proses negosiasi murni berjalan dalam jalur bisnis.

"Saya kira tidak ada (tekanan). Penyelesaian ini dilakukan secara *corporate* antara Pertamina dan Exxon Mobil. Solusinya adalah solusi *corporate*," katanya di Jakarta, kemarin.

Infrastruktur

Kepastian pengelolaan Blok Cepu itu disambut Bupati Bojonegoro Santoso dengan segera membebaskan lahan di area Blok Cepu. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih mendata berapa arena lahan seluas 800 hektare yang belum dibebaskan.

Saat ini ada tiga kecamatan di Bojonegoro yang warganya mengelola sumber migas dengan cara tradisional di antaranya di Kecamatan Kasiman. "Meski nanti dieksplorasi keberadaan penduduk tetap dipertahankan dan tidak bakal digusur," ujar Santoso kepada wartawan di Surabaya, kemarin. (Ndy/FL/E-1)

MIGAS

Indonesia Tetap Kendalikan Blok Cepu

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2006

KPK Diminta Ambil Alih Kasus Pertamina

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Penyelidikan DPR terhadap kasus indikasi KKN di Pertamina meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih 11 kasus yang macet penanganannya di Kejaksaan Agung (Kejagung). "Kami meminta KPK mengambil alih kasus yang mandek penanganannya di Kejagung. Ada 11 kasus dengan nilai total kerugian negara sebesar US\$13 miliar," kata Ketua Pansus I Emir Moeis di Gedung KPK Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (14/3).

Sebelas kasus itu antara lain Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dan PT Ustraindo yang melibatkan Mantan Mentamben Ginandjar Kartasasmita, proyek Exxon-I Balongan, Kasus Perta Oil, Kasus pipanisasi Jawa, PT Tugu Pratama Indonesia, kasus PT Ariosetowijoyo, kasus PT Panutan Selaras, kasus proyek TAC Blok Cepu dengan PT Humpuss Patragas dan kasus tuntutan Arbitrase Karaha Bodas Company (KBC). (imm)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 7 TAHUN 2006	

Jatim Sambut Exxon

Kesepakatan antara Pertamina dan Exxon MobilOil Indonesia (EMOI) yang menetapkan Mobil Cepu Limited (MCL) anak perusahaan selaku *General Manager* pengelolaan Blok Cepu mendapat tanggapan positif dari masyarakat di Jawa Timur. Syarif Usman, ketua DPRD Bojonegoro mengatakan kesepakatan itu merupakan langkah maju dari kedua belah pihak atas dasar peningkatan perekonomian masyarakat secara luas dan terpenuhinya kebutuhan minyak dalam negeri.

"Masyarakat sudah terlalu jenuh dengan berlarut-larutnya penyelesaian blok Cepu ini, sehingga mereka menyambut baik hasil kesepakatan yang kami anggap pola yang ideal untuk transparansi pengelolaan," kata Syarif kepada *Investor Daily*.

Menurut Syarif, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan itu pihaknya minta JOA segera direalisasikan agar tidak memancing opini pro kontra di tengah masyarakat yang berpotensi menunda pelaksanaan eksplorasi. Hal senada juga disampaikan Suyoto, anggota Komisi D DPRD Jatim yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim.

"Masyarakat Jawa Timur khususnya Bojonegoro sangat senang dengan kesepakatan itu meskipun sebetulnya tidak terlalu penting siapa yang mengelola Blok Cepu, apakah Pertamina atau Exxon. (ros)

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA						<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>					
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI				<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM					
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14	15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31								
HALAMAN : 7											TAHUN 2006

Upeti buat Condy

Seperi diduga sebelumnya, penanganan blok Cepu akhirnya jatuh ke tangan ExxonMobil Oil Indonesia. Hasil kompromi ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Ari H. Sumarno, sesaat setelah dia dilantik sebagai orang nomor satu di Pertamina menggantikan Widya Purnama.

Esok harinya, koran ini menuliskan berita utama dengan judul besar: *Pertamina melunak soal Cepu*. Karena, malam itu, Ari memang mengatakan posisi *general manager* untuk *operatorship* proyek Cepu tidaklah begitu penting. Yang penting, menurut dia, adalah bagaimana Blok Cepu segera menghasilkan minyak.

Tak tanggung-tanggung, 30 tahun lamanya, Exxon akan mengendalikan Cepu. Meskipun hampir semua orang Indonesia berteriak agar bangsa ini menangani sendiri eksploitasi ladang minyak dengan potensi cadangan 11 miliar barel itu, ternyata elit kekuasaan menentukan lain.

Mereka lebih memilih dan memercayai kekuatan asing untuk memompa kekayaan bangsa ini. Oke, memang bisa diperdebatkan bahwa dalam badan kerja sama untuk blok Cepu tersebut, terdapat unsur-unsur Indonesia melalui operasi bersama itu. Namun, dengan penunjukan GM di tangan Exxon, praktis penentu kebijakan adalah perusahaan Amerika Serikat itu.

Arah pemercepatan keputusan penentuan siapa memimpin dalam ope-

rator bersama Blok Cepu ini justru patut dipertanyakan—termasuk pergantian pucuk pimpinan Pertamina yang tak terpisahkan dari kemelut Cepu itu. Mau dibikin seribu alasan pun, masyarakat yang masih berpikiran waras tentu akan melayangkan tuduhan bahwa elit kekuasaan kita sengaja melakukan rekayasa.

Sehingga, keputusan yang amat strategis menyangkut nasib 240 juta rakyat Indonesia itu ditentukan secara tergesa-gesa dan cenderung gegabah. Ada apa di balik semua rentetan kejadian tersebut?

Mau tak mau, kita berpikiran bahwa semua itu dilakukan demi menyambut kehadiran tamu agung, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza 'Condy' Rice. Pemerintah boleh beralih dan boleh berkilah bahwa hal itu tidak berkaitan. Namun, itulah fakta tersirat yang dengan mudah dapat ditangkap, bahkan mungkin oleh orang awam sekalipun.

Kalau memang demikian halnya, itulah hadiah terbaik—bolehlah kita sebut sebagai upeti—yang dipersembahkan bagi kehadiran Condy. Tak heran bila sebagian di antara saudara-saudara kita berang menyaksikan pemandangan yang timpang ini.

Tidak sedikit di antara anggota masyarakat yang kemudian—baik secara *guyon* maupun serius—menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia telah tergadaikan akibat keputusan tersebut. Karena, untuk menentukan apa yang

35

harus kita lakukan, kita seolah tidak memiliki kebebasan.

Namun, tidak sedikit yang berpendapat bahwa dengan pengelolaan Cepu di bawah kepemimpinan Exxon, justru bangsa Indonesia akan memperoleh hasil terbaik. Karena, dengan kinerja Pertamina selama ini, toh tidak sedikit pendapatan yang seharusnya masuk ke kocek negara justru *diembat* oleh para koruptor.

Harapan kita adalah dengan telah diputuskannya Exxon sebagai general manager untuk menangani blok Cepu, kita tetap sebagai pihak yang diuntungkan. Terdapat sejumlah anak bangsa yang terlibat dalam lembaga kerja sama kepengelolaan itu maupun di tubuh Exxon sendiri.

Kita tentu menginginkan para anak bangsa tersebut masih memiliki kepedulian nurani untuk hanya memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Bangsa ini sudah terlalu lama menderita. Jangan diperparah lagi dengan penderitaan akibat pembagian hasil Blok Cepu yang tidak berpihak kepada rakyat kita.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2006

50% Saham Cepu dilego US\$400 juta

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Pertamina diketahui menjual (*farm out*) 50% kepemilikan sahamnya di Blok Cepu ke ExxonMobil senilai US\$400 juta. Namun transaksi penjualan saham itu tidak diketahui oleh Dirut PT Pertamina Ari H. Soemarno.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yudiantoro dengan Komisi VII DPR, Senin malam.

"Parties dalam *technical assistance contract* mengembalikan Blok Cepu kepada pemerintah. Ada hitam di atas putihnya. Pemerintah kemudian mengembalikan 100% saham kepada Pertamina, dan selanjutnya Pertamina mem-*farm out* 50% dengan harga US\$400 juta, sehingga *equity participation* [dengan ExxonMobil] menjadi 50:50," ungkap Purnomo.

Keputusan penjualan saham itu, menurut Menteri ESDM, disepakati oleh Pertamina dan ExxonMobil, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM. "Yang tanda tangan saat itu adalah Widya Purnama, dirut Pertamina yang lama."

Purnomo menambahkan penjualan saham itu dilakukan Pertamina sebelum ditandatangani kontrak kerja sama (KKS) pada 17

September 2005.

Widya hingga tadi malam tidak bisa dihubungi *Bisnis* untuk dimintai verifikasinya. Begitu juga pesan singkat yang dikirim ke telepon selulernya, tidak dijawab.

Belum terima

Namun, Dirut PT Pertamina Ari H. Soemarno mengaku dia tidak mengetahui penjualan 50% saham Blok Cepu senilai US\$400 juta itu. Dia bahkan mengatakan uang hasil penjualan saham itu belum diterima Pertamina.

"Mungkin yang dimaksud adalah Exxon menyerahkan lapangan Sukowati kepada Pertamina, itu adalah kompensasi untuk 50% di Blok Cepu," ujar Ari, kemarin.

Vice President Planning, Commercial & Public Affairs ExxonMobil Oil Indonesia Inc. (EMOI) Maman Budiman menjelaskan tidak pernah terjadi transaksi keuangan sebesar US\$400 juta dalam kepemilikan 50% saham Blok Cepu.

Dia juga menyatakan hal yang berbeda dengan Menteri ESDM menyangkut pengembalian hak 100% saham Blok Cepu kepada Pertamina oleh pemerintah setelah TAC tidak berlaku.

Menurut Maman, setelah Blok Cepu dikembalikan ke pemerintah karena TAC tidak berlaku, pemerintah mengembalikan lagi langsung kepada ExxonMobil 50% dan Pertamina 50%.

"Pada waktu TAC di-terminate, dikembalikan ke pemerintah kemudian diberikan balik langsung ke Pertamina dan Exxon 50:50 dengan kompensasi yang ada di *Memorandum of Understanding*," ujarnya kemarin.

Awal pekan ini, EMOI bersama PT Pertamina sepakat membentuk struktur organisasi pengelolaan Blok Cepu (*Bisnis*, 14 Maret).

Kesepakatan ini dicapai sehari sebelum kedatangan Menlu AS Condoleezza Rice ke Jakarta, sehingga menimbulkan beragam persepsi masyarakat. ExxonMobil merupakan salah satu raksasa migas AS yang berbasis di Irving, Texas.

Namun, Menneg BUMN Sugiharto menegaskan percepatan penyelesaian Blok Cepu tidak berkaitan dengan kedatangan Menlu AS itu.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, kontrak bantuan teknis ExxonMobil di Blok Cepu berakhir 2010, sehingga sesuai UU No. 22/2001 tentang Migas, kontrak semacam itu tidak diakui lagi setelah masanya berakhir, kecuali dalam bentuk KKS.

Namun, karena ExxonMobil tetap ingin menggarap Blok Cepu, Pertamina saat dipimpin Baihaki Hakim mengajukan kompensasi US\$400 juta. ExxonMobil hanya menyanggupi US\$40 juta, sehingga perundingannya berlarut-larut. (APRIKA R. HERNANDA/DIENA LESTARI/ZUFRI-ZAL) (dwi.djanuarto@bisnis.co.id)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2006

Sugiharto: Exxon tak Punya Hak Prerogatif

JAKARTA — Kendati ExxonMobil Oil Indonesia menjadi *general manager* (GM) dalam struktur organisasi proyek Cepu, namun perusahaan asal AS itu tak mempunyai hak prerogatif. Tanpa persetujuan dari *joint operating committee* (JOC) yang diketuai Pertamina, Exxon tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis.

"*General manager* tidak punya hak prerogatif. Tanpa ada persetujuan dari JOC, satu dolar pun tidak bisa dikeluarkan," kata Menteri Negara BUMN, Sugiharto, di Jakarta, kemarin (14/3).

Menurutnya, setelah melakukan 34 kali rapat, Exxon dan Pertamina sepakat saling berbagi di perusahaan patungan itu. Exxon mendapatkan posisi *general manager*, sedangkan Pertamina di JOC meski keterwakilannya berimbang.

"GM-nya dia, DGM-nya (*deputy general manager*) kita. *Operation manager* dia, *planning manager* kita," katanya. Penentuan posisi ini disepakati kedua pihak secara *business to business*.

Dirut PT Pertamina (Persero), Ari Soemarno, mengklaim Pertamina tetap menjadi pemegang kendali di Blok Cepu. Sebab, porsi Pertamina setara dengan Exxon dan BUMD, yaitu sebagai kontraktor.

Karena itu, setiap keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama yang diverifi-

kasi pemerintah. "Kita masih pegang kendali, jadi tidak ada yang menang atau kalah," katanya.

Keputusan yang diambil di Blok Cepu, tambah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, merupakan solusi korporat. "Tugas pemerintah sudah selesai saat kontrak kerja sama (KKS) ditandatangani, 17 September 2005," katanya.

Terkait itu, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) menilai struktur organisasi bersama Cepu tidak mencerminkan proporsi yang maksimal bagi tenaga ahli Indonesia.

"Secara geologi dan geofisika, eksplorasi lapangan minyak di Blok Cepu bukan sesuatu yang istimewa dan sulit," ujar juru bicara IAGI dan HAGI, Abdul Mutalib Masdar.

Ia juga menilai struktur organisasi proyek Cepu terlalu gemuk yang mengakibatkan membengkaknya biaya investasi dan operasi (*cost recovery*). Hal ini karena besarnya gaji pada pos-pos tertentu yang diisi tenaga kerja dari Exxon.

Pandangan senada dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Marwan Batubara. Ia menilai diserahkannya posisi GM ke Exxon membuktikan pemerintah takluk kepada asing. "Pemerintah tak berpihak untuk membangun kemandirian bangsa di sektor ener-

TEGUH INDRA/REPUBLIKA



Kita masih pegang kendali, jadi tidak ada yang menang atau kalah.

Ari Soemarno
Dirut PT Pertamina

gi," kata Marwan.

Pengusaha minyak dan gas, Emil Abbas, sudah menduga Blok Cepu akan dikuasai Exxon. Di antara indikasinya adalah kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu ke markas Exxon di AS.

Namun, Sugiharto membantah kesepakatan diambil terkait kedatangan Menlu AS, Condoleezza Rice, ke Indonesia. ■ dia/djo/dam/dwo

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2006

Pertanggungjawaban Blok Cepu

Negeriku malang, negeriku pecundang. Itulah julukan yang paling tepat untuk melihat bangsa Indonesia saat ini. Kebijakan-kebijakan yang dibuat di sektor energi, sejak era pemerintahan Presiden BJ Habibie, membuat bangsa kita mengalami "sakratul maut" alias sekarat.

Entah bangsa kita telah ter-tipu atau ditipu oleh teori-teori yang meninabobokkan. Yang pasti, kebijakan yang diambil seperti enak tetapi pahit. Itulah yang terjadi bertubi-tubi, sehingga kekayaan sumber daya alam negeri kita betul-betul mengalami degradasi tak ter-perikan.

Coba lihat dengan mata

Oleh Ichsanuddin Noorsy

*Pemerhati Masalah
Kebijakan Publik*



yang jernih dan jujur: adakah kebijakan di sektor energi betul-betul menenteramkan dan mengarah pada kesejahteraan

rakyat? Nyaris semua kebijakan itu menyengsarakan! Belum lagi pengambilan kebijakan di sektor energi ini dilatari hal-hal tidak logis.

Begitu pula kebijakan menyangkut lapangan minyak Blok Cepu. Pangkal persoalan lapangan minyak ini bermula dari pengalihan pola *technical assistant contract* (TAC) ke kontrak kerja sama (KKS). Ini mesti ditelisik: sebagai sebuah kesalahan. Harus pula diteliti siapa figur yang mendorong lahirnya kesepakatan tentang itu.

Pertanggungjawaban pengalihan pola TAC ke KKS, sekalipun sah sebagai sebuah kesepakatan, jelas mempunyai motif. Karena itu, harus ditelusuri bagaimana kesepakatan tersebut bisa lahir. Lalu siapa figur serta aktor intelektualnya. Dengan demikian, terbuka peluang bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menggugat pemerintah kepada Mahkamah Agung. Karena kontrak itu jelas telah menyengsarakan rakyat Indonesia sekarang dan di masa datang.

Kalau kita menarik konklusi, maka negeri ini memang sudah masuk perangkap kolonialisme. Walaupun sejak zaman Soekarno sudah terpasang, perangkap tersebut terus berlangsung hingga sekarang ini.

Di era pemerintahan Presiden Soeharto, AS mendapatkan konsesi tambang Freeport di Papua yang memiliki kekayaan emas berlimpah tiada tara. Lalu di masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono sekarang ini, AS sejak jauh hari sudah menargetkan menguasai Blok Cepu. Target tersebut terbukti bisa mereka capai melalui kesepakatan yang dibuat pihak ExxonMobil dan tim perunding pemerintah.

Tapi seperti juga konsesi tambang Freeport, penguasaan Blok Cepu oleh pihak AS ini niscaya berbuntut negatif: di belakang hari, masyarakat memprotes karena mereka tidak puas. Terlebih kalau proses pengalihan pola pengelolaan Blok Cepu ini — dari TAC ke KKS — direkayasa lewat aturan-aturan yang sengaja dibuat.

Lepasnya pengelolaan Blok Cepu ke tangan ExxonMobil ini niscaya merupakan tamparan menyakitkan: bahwa harkat dan martabat kita selaku bangsa terhinaan — karena kebijakan pemerintah lebih

berpijak pada asing ketimbang bagi kepentingan rakyatnya sendiri.

Kebijakan pemerintah yang membuat pengelolaan Blok Cepu jatuh ke tangan ExxonMobil ini lebih terasa menyakitkan karena ExxonMobil sudah sejak lama melihat bahwa lapangan minyak tersebut menyimpan cadangan sangat besar — dan karena itu mereka akan melakukan upaya apa pun untuk bisa menguasainya. Jadi, kenapa pemerintah tidak mengambil kebijakan bahwa Blok Cepu dikelola oleh anak bangsa kita sendiri?

Bantahan demi bantahan menyatakan kontrak pengalihan status kontrak pengelolaan Blok Cepu dari TAC ke KKS bersih dan tidak cacat.

Juga pemberian hak pengelolaan kepada ExxonMobil sudah sesuai aturan dan disepakati bersama. Namun patut dicatat bahwa kebijakan yang dibuat bisa dikondisikan terlebih dahulu dan telah dirancang sedemikian rupa.

Alhasil, sebelum disusun perumusannya, kebijakan pengalihan status

kontrak Blok Cepu ini sudah sampai pada kata sepakat. Ini yang disebut rekayasa dokumen yang sistematis, sehingga di kemudian hari sulit untuk membuktikan adanya penyimpangan pada pengalihan status kontrak itu.

Namun itu bukan berarti tak bisa ditelusuri. Paling tidak, manakala pemerintahan sudah berganti, persoalan ini bisa terkuak. Karena itu, bagi pihak-pihak yang berperan besar dalam pengalihan TAC ke KKS Blok Cepu akan dituntut pertanggungjawabannya di kemudian hari. Rakyat mungkin saja menggugat dan meminta mereka diusut dan diproses secara hukum.***

**...pihak-pihak
yang berperan
besar dalam
pengalihan TAC
ke KKS Blok Cepu
akan dituntut
pertanggung-
jawabannya di
kemudian hari.**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2006

Kesepakatan Dibuat dengan Terpaksa

JAKARTA (Suara Karya): Pengalihan status kontrak lapangan minyak Blok Cepu dari *technical assistant contract* (TAC) menjadi kontrak kerja sama (KKS) dicurigai sebagai rekayasa pemerintah melegalkan pengelolaan Blok Cepu oleh ExxonMobil. Karena itu, anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto menyebut pengalihan status kontrak itu ilegal dan merupakan penjarahan.

Sementara anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo menilai, kesepakatan tentang pengelolaan Blok Cepu dibuat berlandaskan beberapa kelemahan dan dilakukan dalam kondisi terpaksa. Itu, katanya, ulah pemerintah sendiri melalui tim perunding yang diturunkan menghadapi ExxonMobil.

"Jadi, yang membuat kita kesulitan adalah negosiator dan pemimpin kita sendiri, bukan pihak asing," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Karena itu, menurut Dradjad, Dirut Pertamina Ari Soemarno harus siap menghadapi tuntutan publik yang kemungkinan muncul di kemudian hari mengenai kesepakatan tentang pengelolaan Blok Cepu ini. Ari, katanya, sulit menghindari risiko itu karena dia merupakan pihak yang menandatangani kesepakatan pengelolaan Blok Cepu.

"Saya sudah ingatkan Soemarno (Dirut Pertamina): Anda yang menekan, Anda yang bertanggung jawab kalau di belakang hari muncul masalah hukum," katanya.

Menurut Dradjad, kesepakatan tentang pengelolaan Blok

Cepu ini bisa dimentahkan melalui tekanan politik. Di lingkungan DPR sendiri, katanya, sudah gencar upaya menggulirkan hak angket.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, sebelum penandatanganan KKS — sekitar awal September 2005 —, Pertamina dan ExxonMobil menyerahkan Blok Cepu ke pemerintah. "Itu hitam di atas putih," katanya.

Menurut Purnomo, perubahan TAC menjadi KKS bukan keinginan pemerintah, melainkan kehendak Pertamina dan ExxonMobil.

Sesuai UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, sebenarnya tidak ada lagi bentuk TAC dalam pengelolaan wilayah kerja migas. Terkait itu, TAC yang masih berlaku harus diubah menjadi KKS.

Selanjutnya, menurut Purnomo, pemerintah mengembalikan 100 persen kepemilikan Blok Cepu ke Pertamina. Ini merupakan keistimewaan terhadap Pertamina sebagai BUMN di sektor migas. "Pertamina kemudian *farm out* 50 persen senilai 400 juta dolar AS ke ExxonMobil. Karena itu, kepemilikan Blok Cepu menjadi 50 persen Pertamina dan 50 persen ExxonMobil," ujarnya.

Purnomo juga menjelaskan, pemerintah menerbitkan PP Nomor 34/2005 yang menyebutkan berapa pun bagian Pertamina berdasarkan KKS, BUMN tersebut mendapat bagian 40 persen dari Blok Cepu. "Jadi, meski KKS menyebut-

kan bagian Pertamina hanya 6,75 persen, sesuai PP itu, pemerintah akan memperoleh tambahan bagian hingga 40 persen," katanya.

Sesuai KKS, porsi bagi hasil produksi Blok Cepu adalah 85 persen pemerintah, 6,75 persen Pertamina, 6,75 persen ExxonMobil, dan 1,5 persen BUMD.

Sementara itu, para profesional di bidang perminyakan yang tergabung dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) menilai kesepakatan pengelolaan Blok Cepu bermuatan politis dan dilakukan atas tekanan pihak AS. "Kesepakatan itu tidak mencerminkan proporsi maksimal untuk tenaga ahli Indonesia dalam menduduki posisi kunci (di organisasi pengelola Blok Cepu)," kata Abdul Muthalib Masdar yang berbicara atas nama IAG dan HAGI.

Menurut Masdar, organisasi baru pengelola Blok yang dibuat sesuai kesepakatan tim perunding pemerintah dan pihak ExxonMobil terlalu gemuk. "Itu pemborosan. Gaji pihak asing berlipat ganda dibanding gaji tenaga dalam negeri," katanya.

Di lain pihak, Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu, Marwan Batubara, yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah agar membatalkan kesepakatan operasi bersama (Joint Operation Agreement/JOA) yang menetapkan ExxonMobil sebagai operator utama Blok Cepu. Dia juga menghimbau DPR agar menggunakan hak angket untuk mengusut pelanggaran dalam negosiasi pengelolaan Blok Cepu yang merupakan ladang kaya minyak di Jateng ini.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2006

Blok Cepu dan Bangsa Kuli

Anif Punto Utomo

Wartawan *Republika*

Sambutan apa yang paling istimewa terhadap kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleezza Rice? Bukan... bukan karena dia disambut khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkarpet merah. Sambutan istimewa itu adalah kemenangan ExxonMobil.

Tidak sampai 24 jam sebelum Condy—panggilan Condoleezza—mendarat di Jakarta, telah diumumkan bahwa Exxon Mobil menjadi kepala operator eksplorasi Blok Cepu. Sebuah ketebulan, atau memang kebenaran sebuah isu bahwa sebelum Condy sampai di Indonesia, semua urusan soal Cepu sudah beres?

Exxon akan memimpin eksplorasi di lapangan minyak dan gas Cepu tersebut sesuai dengan keinginan mereka: 30 tahun. Pertamina yang menginginkan agar dilakukan rotasi tiap lima tahun untuk memimpin eksplorasi hanya bisa 'gigit jari'. Boleh dikata, Pemerintah ikut 'menggigit jari' Pertamina, bahkan lebih keras.

Perebutan soal siapa pengelola Cepu ini memang sudah cukup lama. Sejak zaman Abdurrahman Wahid jadi presiden, Exxon sudah berulang kali 'menembus' pemerintah agar bisa lolos. Begitu juga ketika zaman Megawati menggantikan Wahid. Tapi belum juga ada keputusan bulat. Kwik Kian Gie merupakan menteri yang paling getol menolak Exxon.

Tarik ulur pengelolaan Cepu kembali marak dalam satu tahun terakhir. Pertamina dan Exxon masing-masing ngotot agar bisa menjadi pengelola. Keduanya merasa mampu mengelola lapangan minyak dan gas tersebut. Pertamina didukung oleh sebagian tokoh-tokoh kritis yang peduli terhadap nasib bangsa. Exxon juga didukung

mereka yang peduli nasib bangsa, bangsa Amerika.

Perang wacana dan perang data diluncurkan. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla mendapat tekanan dari tokoh-tokoh kritis dan anggota DPR agar Pertamina lolos. SBY-Kalla juga mendapat tekanan dari pemerintah Amerika agar Exxon lolos. Hasil akhirnya, tekanan Amerika lebih diperhatikan: mereka dimenangkan.

Well done

Dalam *Joint Operation Agreement (JOA)* yang strukturnya organisasinya tertuang dalam *Cepu Organization Agreement*, Exxon resmi menjadi 'komandan' dalam pengelolaan ladang minyak dan gas di Cepu. Dari Pertamina, sebagai pihak yang memiliki lapangan tersebut, cukup dijadikan wakil saja. Di sini, Pemerintah telah melakukan putusan yang baik (*well done*) bagi Amerika.

Memang sejak awal sudah banyak pertanda bahwa Exxon akan dimenangkan dalam perebutan eksplorasi ini, di antaranya:

- Pemerintah Amerika berkali-kali menekan agar Exxon dimenangkan, bahkan Presiden Bush sesekali turun tangan.

- Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa operasional Cepu bukan masalah nasionalisme tetapi profesionalisme.

- Meneg BUMN Sugiharto memberi prasyarat untuk mengelola Cepu adalah modal, sistem logistik, kemampuan teknologi, dan pengalaman eksplorasi daerah lain. Dan jika diperbandingkan antara Pertamina dan Exxon, maka pernyataan itu mengarah ke Exxon.

- Penegasan Presiden SBY bahwa Pertamina akan di-overhaul menyiratkan bahwa Pertamina perlu berbenah diri dulu.

- Pernyataan direktur Pertamina Hestu Bagyo dalam wawancara di

Metro TV yang menyatakan bahwa Pertamina tidak mampu mengelola Cepu.

- Tergusurnya Widya Purnama dari dirut Pertamina, karena selama ini dialah yang paling *ngotot* agar Pertamina yang mengelola lapangan Cepu.

Menentukan

Pertanyaan yang sering muncul, mengapa posisi sebagai operator, atau dalam kasus Cepu ini adalah posisi general manager, diperebutkan? Karena posisi operator ini yang paling menentukan: mereka yang melakukan perencanaan, mengelola keuangan, memilih teknologi yang dipakai, dan juga memilih sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Sudah pasti, karena Exxon yang memimpin, merekalah yang akan memilih yang menguntungkan mereka. Rekanan-rekanan mereka yang notabene asing jugalah yang akhirnya akan memperoleh cipratan rezeki dari Cepu. Terkadang harganya pun bisa digelembungkan semau mereka.

Dan yang sudah pasti, biaya eksplorasi dan eksploitasi (*sunk cost*) akan mereka bikin sangat besar. Kenapa, karena yang menanggung biaya tersebut adalah negara kita. Operator tidak

peduli berapa dana yang dikeluarkan untuk *sunk cost* atau dikenal dengan istilah *cost recovery*.

Perhitungan sederhana, dalam pengeboran minyak, maka bagi hasilnya adalah 85 persen untuk negara dan 15 persen operator. Tetapi pembagian tersebut setelah dikurangi biaya *sunk cost*. Tak heran kalau Exxon senaknya mematok biaya 360 juta dolar AS per tahun untuk pengelolaan Cepu, padahal Pertamina mampu 120 juta dolar AS per tahun.

Itulah mengapa Exxon *ngotot* menjadi operator Cepu. Apalagi, menurut hasil kajian Humpuss Patragas (pemilik pertama blok ini), cadangan minyak yang bisa dieksploitasi di wilayah itu sekitar 2,6 miliar barel, dengan total produksi nantinya 170 ribu barel per hari. Kelak miliaran dolar akan lari ke Amerika lewat *sunk cost* yang telah digelembungkan.

Putusan bahwa Exxon yang menjadi pengelola adalah putusan bisnis, tapi keputusan bisnis yang dilandasi kepentingan politis. Pemerintah Amerika sangat berperan dalam menentukan keputusan tersebut. Sebagai 'orang minyak', Bush tahu betul bahwa Exxon sangat berkepentingan mengelola Cepu.

Bisnis minyak sangat mewarnai kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Penyerangan terhadap Afghanistan yang berdalih penyerbuan terhadap sarang teroris adalah karena minyak. Begitu juga invasi ke Irak, semata-mata karena Amerika ingin menguasai minyak di negara tersebut.

Lagi pula, ini balas budi Bush terhadap perusahaan itu. Maklum, Exxon yang berhasil memupuk keuntungan 36,2 miliar dolar AS pada 2005, sudah menyumbang 2,8 juta dolar AS kepada Bush dalam pemilu presiden 2004 silam. Belum terhitung sumbangan-sumbangan lain terhadap orang-orang di sekitar Bush.

Sebetulnya, jika landasannya murni bisnis, Pertamina sanggup. Soal biaya, siapa lembaga keuangan yang tidak tergiur dengan keuntungan Cepu? Soal kemampuan, Pertamina punya pengalaman—kalaupun kurang, panggil saja ahli perminyakan yang bekerja di perusahaan asing. Begitu juga teknologi, ibaratnya kalau tidak punya, tinggal beli.

Pertanyaannya: Amerika Serikat terlalu 'perkasa' untuk pemerintahan SBY Kalla, atau pemerintahan SBY-Kalla yang tidak memiliki keberanian?

Kentara sekali bahwa 'keperkasaan' Amerika Serikat sangat mewarnai kemenangan Exxon. Tekanan yang berujung pada kemenangan Exxon terse-

but menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa tidak pernah punya kepercayaan diri. Kita tidak pernah bangga dengan kemampuan sendiri. Kita tidak pernah sadar bahwa kita mampu bersaing.

Presiden SBY dan Wapres Jufuf Kalla seringkali mengkritik media agar jangan melulu menurunkan berita-berita pilu dan berita buruk yang mengarah ke pesimisme. Sekaligini perlu berita optimis. Tapi, dengan melihat kasus Exxon ini, justru pemerintah yang membawa negara ini pesimistis, tidak percaya diri, dan mau di-injak-injak asing.

Kasus Cepu ini mencerminkan bahwa Pemerintah mengajarkan pada rakyatnya untuk selalu tunduk pada kepentingan asing. Pemerintah mengajarkan pada rakyat agar jangan percaya kepada kemampuan diri sendiri. Pemerintah mengajarkan rakyat agar cukup menjadi kuli bangsa asing, bahkan di negara sendiri.

Terbayang ketika SBY menyambut Condoleezza Rice, dia akan menyapa: *Welcome, Condy*. Dengan segera pula Rice akan menjawab: *Well done, SBY*. ■

Ikhtisar

- Tidak sampai 24 jam sebelum Merlu AS, Condoleezza Rice, mendarat di Jakarta, ExxonMobil diumumkan sebagai kepala operator eksplorasi Cepu.
- Exxon akan memimpin eksplorasi sesuai keinginan mereka: 30 tahun dan tidak dirotasi setiap lima tahun sekali seperti keinginan Pertamina.
- Dengan menjadi operator, Exxon menentukan perencanaan, pengelolaan keuangan, teknologi yang dipakai, dan SDM yang dibutuhkan.
- Bagi hasil Cepu adalah 85 persen untuk negara, 15 persen untuk operator. Tapi pembagian tersebut setelah dikurangi biaya eksplorasi dan eksploitasi (*sunk cost*) yang dibebankan kepada negara.
- Putusan Exxon yang menjadi pengelola adalah putusan bisnis, tapi keputusan bisnis yang dilandasi kepentingan politis dengan peran besar pemerintah AS.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2006

Blok Cepu Harus Dievaluasi Tiap Lima Tahun

Jakarta — Terpilihnya ExxonMobil Indonesia menjadi operator pengelolaan Blok Cepu dinilai hanya akan merugikan negara di masa mendatang.

Hasil kesepakatan yang menempatkan ExxonMobil sebagai operator, juga membuktikan kelemahan pemerintah menghadapi perusahaan multinasional.

Kebijakan ini juga merupakan cermin ketidakkonsistenan pemerintah yang ingin mewujudkan Pertamina sebagai perusahaan perminyakan kelas internasional. Demikian pendapat ekonom LPEM Universitas Indonesia, Nuzul Achyar dan anggota Komisi VI DPR Zulkiflimansyah kepada SH di Jakarta, Selasa (14/3).

"Kesepakatan ini bertolakbelakang dengan keinginan Presiden yang menginginkan Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia," kata Ekonom LPEM Universitas Indonesia, Nuzul Achyar ketika dihubungi SH di Jakarta,

Selasa (14/3).

Dengan menyerahkan kepemimpinan pengelolaan Blok Cepu ke ExxonMobil akan lebih banyak kerugian bagi Indonesia.

Kerugian ini meliputi kerugian secara ekonomi, seperti kebijakan keuangan dan manajemen pengelolaan Blok Cepu akan dikontrol oleh ExxonMobil.

Ia menyatakan penunjukan ExxonMobil juga tidak memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia karena dipastikan tidak ada transfer teknologi yang signifikan seperti yang sering dijanjikan perusahaan multinasional. "ExxonMobil akan mendikte segala kebijakan menyangkut pengelolaan Blok Cepu," tegasnya.

Ia mengaku heran bagaimana Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas internasional jika tidak pernah diberikan kesempatan berkiprah negeri sendiri.

Ke depan, ExxonMobil yang memiliki kontrak kerja sama (KKS) selama 30 tahun akan cenderung berorientasi pada keuntungan dengan mengeksploitasi cadangan minyak dan gas habis-habisan sebelum kontrak selesai. "Ini tidak diatur dalam kesepakatan sehingga sah-sah saja jika mereka melakukan itu," ujarnya.

Ia mendesak agar setiap 5 tahun sekali dilakukan evaluasi terhadap ExxonMobil sehingga Indonesia tidak terus dirugikan. Seperti diketahui Blok Cepu memiliki cadangan minyak 600 juta barel dan gas bumi 1 triliun kaki kubik. Harga minyak bumi dan gas dari tahun ke tahun menunjukkan trend terus naik. ExxonMobil mengaku akan menginvestasikan dana US\$ 2,5-2,6 miliar untuk pengembangan secara total.

Murni Bisnis

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menyatakan, kesepakatan pengelolaan Blok Cepu adalah hasil murni negosiasi *business to business*. Pemerintah selaku *steering committee* (panitia pengarah) hanya

bekerja jika dalam perundingan terjadi stagnasi.

"Namun kenyataannya, hasil perundingan berjalan bahkan sampai pembahasan *Joint Operating Agreement* (JOA) tidak ada halangan," ujar Purnomo di Jakarta, Selasa (14/3) pagi. Sedangkan anggota Komisi VI DPR, Zulkiflimansyah mewanti-wanti, jangan sampai ada kesan tercapainya kesepakatan bentuk kerja sama operasi Blok Cepu dipaksakan berkaitan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri AS, Condoleezza Rice ke Indonesia. "Jangan sekadar ingin memberi kado kepada Rice" katanya kepada SH, Selasa (14/3).

Zulkiflimansyah mengatakan, pihak DPR tetap tidak mengerti mengapa pemerintah memilih bekerja sama dengan Exxon. Tidak ada alasan yang jelas, sehingga kecurigaan tidak terhindarkan lagi.

Ia sendiri memahami, pemerintah sangat membutuhkan dana dalam waktu cepat namun keputusan yang dibuat hendaknya jangan sampai menimbulkan ketergantungan baru terhadap pihak asing.

"Pada praktiknya, kerja sama multilateral selalu

menciptakan ketergantungan dalam jangka panjang, termasuk ketergantungan teknologi. Ini yang menjadi perhatian DPR sebenarnya. Oleh karena itu kami di DPR satu suara memperjuangkan Pertamina dalam Blok Cepu," kata dia.

Cukup Adil

Pakar migas senior, Ramses Hutapea menilai kesepakatan yang dicapai oleh Pertamina dan Exxonmobil kemarin merupakan hal yang positif dan sebuah penyelesaian yang adil bagi pengolahan Blok Cepu. "Pembagian peran sudah cukup baik dan adil, jadi ini akan betul-betul menjadi sebuah *joint operation*, dan saya yakin ini lebih baik dibandingkan kalau bergiliran menjadi pengelola selama lima tahun," katanya.

Ramses, yang dihubungi SH, Selasa (14/3) pagi, di Jakarta, mengemukakan pembagian posisi itu cukup berimbang. Kesepakatan yang dicapai kemarin itu adalah ExxonMobil akan menduduki posisi general manager, operating manager dan deputy planning manager. Sedangkan Pertamina akan menduduki posisi deputy general manager, deputy

operating manager, dan planning manager.

Menurut Ramses, ada keuntungan planning manager dipegang Pertamina, karena dengan demikian berbagai perencanaan akan dilakukan di Indonesia, dan bukan di Amerika. Selain itu jabatan deputy GM, maupun deputy operating manager tetaplah posisi penting karena dengan demikian pengawasan tetap dapat dilakukan bersama-sama.

"Jadi, ExxonMobil pun tidak bisa berjalan sendiri, apalagi Indonesia yang memimpin komite bersama yang akan mengawasi seluruh kegiatan di Blok Cepu, artinya apa yang dirancang oleh general manager dan jajarannya bisa saja tidak disetujui oleh komite," katanya.

Jadi, dengan struktur ini maka isu *cost recovery* yang selama ini dikuatirkan akan menjadi sumber kerugian negara, dapat dikendalikan, katanya. "Yang penting Pertamina harus menempatkan orang-orang yang profesional dan punya nasionalisme yang berkobar-kobar. Harus profesional karena ini memakai pendekatan 'B to B', dan itu lebih sehat," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ramses, yang pernah banyak

berperan dalam pengembangan elpiji di Indonesia, juga menyatakan bahwa tidak tepat bila dikatakan Pertamina telah menjual haknya kepada Exxonmobil senilai US\$ 400 juta.

"Yang dijual itu hanya berbagai fasilitas dan aset Pertamina, karena sejak diberlakukan UU Migas No 21/2001, maka hak kuasa pertambangan migas yang dipegang Pertamina hilang dan beralih ke BP Migas, padahal aset-aset Pertamina ada di Blok Cepu sehingga itulah yang diklaimnya. Namun pada saat yang sama, UU itu juga secara langsung menjadikan Pertamina kontraktor di ladang-ladang yang pernah dikelolanya," jelasnya.

Semalam, di Komisi VII DPR, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan PT Pertamina telah menjual (farm out) 50 persen kepemilikan sahamnya di Blok Cepu kepada ExxonMobil senilai US\$ 400 juta, dan itu dilakukan sebelum penandatanganan kontrak kerja sama 17 September 2005 oleh Dirut Widya Purnama waktu itu.

(danang j murdono/layana susapto/khomarul hidayat/kristanto hartadi)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 23

TAHUN 2006

BN Dbolehkan Bahas Dampak Kenaikan BBM

KUALA LUMPUR—Anggota Parlemen Barisan Nasional (BN)—koalisi parpol pendukung pemerintahan—dapat mengungkapkan segala bentuk masalah yang dihadapi oleh rakyat, khususnya dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, silakan hal itu dibahas dan dilaporkan pada sidang Parlemen.

Dengan demikian, diberi kesempatan untuk mengemukakan masalah yang dihadapi oleh rakyat sampai di kawasan tempat tinggal mereka terkait kenaikan harga BBM.

Wakil rakyat, menurut Badawi, bisa membahas kenaikan harga BBM, baik saat tanya jawab atau dalam pembahasan yang mengangkat usul Raja Malaysia, Tuanku Syed Sirajuddin Tuanku Syed Putra Jamalullail.

"Itulah kesempatan untuk wakil rakyat membahasnya. Ini menunjukkan mereka prihatin terhadap masalah rakyat," kata

Badawi jumpa pers setelah menggelar rapat dengar anggota dengan Dewan Rakyat dan Dewan Negara dari BN di Gedung Parlemen, Senin (13/3).

Untuk memastikan bahwa rakyat tidak dibebani oleh meningkatnya biaya hidup, pemerintah akan mengambil dan mengenakan tindakan tegas terhadap pedagang yang mencoba menaikkan harga barang. "Pemerintah memberi perhatian terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat sebagai dampak kenaikan harga BBM dan meminta wakil rakyat BN membantu pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada rakyat mengenai alasan kenaikan BBM," tutur Badawi.

Paham kesusahan rakyat

Ia menyangkal tuduhan sebagian pihak bahwa wakil rakyat BN mengalami kesukaran dalam memberi penjelasan kepada rakyat mengenai alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Sebab, mereka memahami kesukaran yang

dihadapi rakyat.

"Tidak susah (wakil rakyat BN untuk memberi penjelasan). Mereka paham kesusahan rakyat dalam hal tertentu. Mereka mengusulkan agar pemerintah memberi perhatian. Kita bersedia memberi perhatian dan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu," tukas Badawi.

Mengenai Program Rencana Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang akan digulirkan pada 31 Maret mendatang, Badawi akan menjawab secara ringkas semua pertanyaan wakil rakyat, baik dari BN mau pun oposisi. "Setelah itu, Dewan Rakyat berpeluang untuk memahasnya," katanya.

Badawi juga mengatakan, persidangan Dewan Rakyat kali ini ditambah empat hari agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Industri Pelayanan Air dan RUU Pelayanan Air Nasional juga dapat dibebaskan. Termasuk di dalamnya RUU Pidana dan Perdata. ■ hassan omar

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (5) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 75

TAHUN 2006

Timteng dibidik jadi investor migas

JAKARTA: Pemerintah akan memperluas tawaran berinvestasi di sektor minyak dan gas ke negara di Timur Tengah (Timteng) lainnya seiring dengan rencana Sonatrach Oil (Aljazair) membangun tangki penampungan minyak mentah dan BBM dengan investasi US\$100 juta.

Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah Alwi Shihab mengungkapkan rencananya untuk berkunjung ke negara-negara Timur Tengah lainnya, seperti Libya, Lebanon, hingga Oman dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi.

"Negara-negara Timur Tengah antusias berinvestasi di sektor minyak dan gas karena produksi minyak dan gas mereka meningkat dari hari ke hari. Mereka tentu mendambakan untuk memasarkan minyaknya ke kawasan ini sehingga perlu untuk memiliki penyimpanan di kawasan ini," ujarnya se usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, awal pekan ini.

(BISNIS/GAJ)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **14** 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

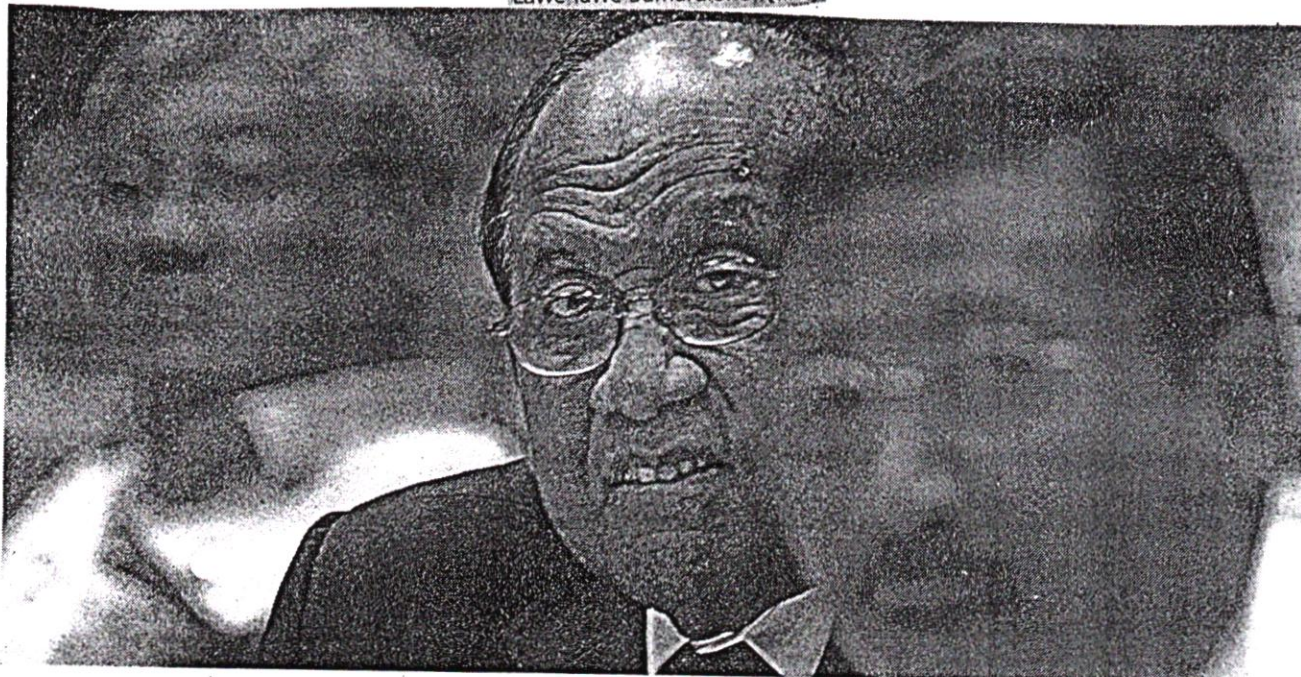
TAHUN 2006

**DPR Tak Puas
Penyelesaian
Kasus Lawe-Lawe**

■ **JAKARTA** - Komisi VII DPR tidak puas dengan penyelesaian kasus penyelundupan minyak mentah di Lawe-Lawe, Kalimantan Timur. Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dengan Mabes Polri, PTB Pertamina (Persero), Mabes TNI Angkatan Laut, Ditjen Perhubungan Laut, dan Ditjen Bea Cukai Depkeu di Jakarta, Senin (13/3).

Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi menyatakan pihaknya kecewa karena hingga saat ini hanya satu pelaku yang ditangkap, sementara pelaku lainnya tidak tersentuh.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Makbul Padmanagara mengakui pihaknya baru menangkap satu pelaku, yakni Kepala Jaga Terminal Lawe-lawe Sumardiono, (ant)



BERANTAS PENYELEWENGAN - Dirut PT Pertamina Ari Soemarno (tengah) bersama Kabareskrim Mabes Polri Komjen Makbul Padmanegara hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VII tentang pemberantasan penyelewengan minyak di Lawe-lawe, Kalimantan Timur di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (13/3). Dalam kesempatan itu Ari menegaskan Pertamina dan Exxon akan menandatangani kerja sama dalam pengelolaan Blok Cepu, Rabu (15/3).

SH/Don Peter

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : B12

TAHUN 2006

Harga minyak terus meningkat



SINGAPURA: Harga minyak di New York terus meningkat mendekati level tertinggi pada pekan lalu, di tengah spekulasi Iran yang mengancam menghentikan ekspor komoditas itu. Spekulasi itu muncul ketika anggota dewan keamanan PBB bertemu dan mempertimbangkan untuk memberi sanksi atas rencana pengembangan energi nuklir Iran. Harga minyak pengiriman April naik US\$0,02 menjadi US\$61,79 per barel di New York Mercantile Exchange.
(BLOOMBERG/ADN)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
--	--

KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 24

TAHUN 2006

Tim Gabungan Menyegel "Nozle" di Dua SPBU

TASIKMALAYA, (PR).-

Beberapa nozle (slang saluran pengisian) mesin pengisi BBM di dua SPBU yang ada di Kota Tasikmalaya, Selasa (14/3) terpaksa disegel untuk sementara. Pasalnya, volume pengisian BBM melalui nozle mesin tersebut, ternyata di bawah ambang batas toleransi minimal yang telah ditetapkan.

Hal itu terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) Komisi B DPRD Kota Tasikmalaya ke dua SPBU, masing-masing di ruas Jalan Raya Singaparna dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

"Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat, mereka mengeluh karena ada beberapa SPBU yang volume pengisian BBMnya meragukan. Oleh karena itu kami menindaklanjutinya dengan sidak ini. Tujuannya, memastikan apakah mesin yang dipakai SPBU sudah sesuai, jangan sampai kurang volumenya. Itu merugikan masyarakat," kata Ade Ruhimat Ketua Komisi B DPRD Kota Tasikmalaya.

Rombongan sidak yang

melibatkan pula Pertamina, Hiswana Migas, Balai Metrologi, Disperindag dan Polresta Kota Tasikmalaya itu langsung menuju SPBU di ruas Jalan Raya Singaparna, tepatnya di kawasan Cikadongdong Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Di sana tim sidak gabungan, melakukan pemeriksaan terhadap semua mesin pengisian BBM dengan menggunakan alat penguji khusus, dari balai metrologi.

Setelah melakukan beberapa kali pemeriksaan, ternyata hasil pengujian bervariasi. Di antaranya volume pengisian fluktuatif (naik turun) tetapi masih berada dalam batas toleransi. Namun ditemukan pula, volume pengisiannya kurang di bawah ambang batas toleransi.

"Untuk nozle yang volume pengisiannya di bawah ambang batas, terpaksa disegel. Batas minimal toleransi volume pengisian itu 0,5%. Kalau kurangnya sudah melebihi itu terpaksa disegel," kata Ketua Balai Metrologi Tasikmalaya, Rachmatul Arief. (A-116)***



YUSUF ADJI/PR

*KOMISI B DPRD Kota Tasikmalaya kembali melakukan sidak ke SPBU di Kota Tasikmalaya, Selasa (14/3). Mereka terjun bersama Pertamina, Metrologi, Hiswana Migas dan Polresta Tasikmalaya, untuk melakukan uji tera volume pengisian bensin dan solar.**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2006

FPDIP siap ajukan hak angket soal Blok Cepu

Oleh TOMY SASANGKA
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Fraksi PDIP DPR tengah mempertimbangkan mengusulkan penggunaan hak angket terkait penandatanganan Kesepakatan Operasi Bersama (Joint Operation Agreement/JOA) yang menetapkan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu.

Agus Condro Prayitno, politisi FPDIP, mengatakan sejak awal fraksinya memang mendukung agar Pertamina menjadi operator lapangan minyak Blok Cepu, Jawa Tengah, bukan ExxonMobil.

"Karena sekarang keputusannya yang jadi operator Ex-

xonMobil, FPDIP mempertimbangkan untuk mengajukan usul hak angket soal itu," ujarnya kepada *Bisnis* kemarin.

Agus menuturkan fraksinya tetap konsisten agar Pertamina yang diprioritaskan menjadi pengelola lapangan minyak potensial itu.

Menurut dia, Pertamina sesungguhnya mampu dan siap mengelola Blok Cepu. "Justru menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah menyerahkan kepada ExxonMobil untuk menjadi operatornya."

Marwan Batubara, koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu, menilai diserahkannya *operatorship* Blok

Cepu kepada ExxonMobil (perusahaan AS) ketimbang kepada Pertamina membuktikan pemerintah takluk kepada asing dan tidak berpihak untuk membangun kemandirian bangsa di sektor energi.

Blok Cepu, menurutnya, merupakan aset bangsa dengan potensi cadangan minyak mencapai 2,6 miliar barel dan cadangan gas bumi sebesar 11 triliun kaki kubik.

Blok ini mestinya dikuasai negara dan dikelola putra-putri Indonesia melalui Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang menyatakan sanggup untuk mengelola Blok Cepu, dengan menawarkan biaya

pengelolaan 60% lebih murah dibandingkan ExxonMobil yang mengajukan biaya pengelolaan US\$2,5 miliar.

"Dengan demikian, Indonesia tak perlu jadi kuli di negeri sendiri," ucap Marwan, kutip *Antara*.

Jika Blok Cepu dikelola ExxonMobil, potensi pendapatan negara yang mencapai Rp51 triliun dalam 10 tahun akan hilang.

"Seharusnya potensi pendapatan ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang telah mencapai lebih dari 60 juta orang."

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

Kasus VLCC Perlu Dukungan Politik

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan, keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengukuhkan keputusan KPPU dalam kasus penjualan kapal tanker jenis *Very Large Crude Carrier* (VLCC) membutuhkan dukungan politik.

Mantan Ketua KPPU Sutrisno Iwantono mengungkapkan, KPPU kesulitan mengeksekusi denda dan hukuman terhadap Goldman Sachs Pte dan Frontline Ltd yang berbasis di Singapura dan Norwegia tanpa dukungan politik. "DPR seharusnya melakukan tindakan politik, karena ini sudah di luar *domain* KPPU," jelas Sutrisno di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (14/3).

Jika eksekusi berhasil dilakukan, pemerintah mendapatkan ganti rugi senilai Rp 241 miliar yang bisa masuk ke kas negara. Sebelumnya KPPU telah memutuskan, pihak terhukum yakni Pertamina, Goldman Sachs Pte, Frontline Ltd, dan PT Perusahaan Pelayaran Equinox (PT Equinox) harus membayar ganti rugi kepada negara. Menurut dia, KPPU sudah memberikan batas waktu satu bulan sejak keputusan tersebut diterima kedua pihak tersebut. (rie)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB <u>MAR</u> APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 4 ExxonMobil tak Punya TAHUN 2006		

Hak Prerogatif

Ami, "Pemerintah Telah Melakukan Kebohongan Publik"

JAKARTA, (PR).- Meski menjadi "panglima" Blok Cepu, ExxonMobil tak lantas bisa berbuat semau-mau-nya. Kata Meneg BUMN Sugiharto, ExxonMobil tetap tak punya hak prerogatif di Blok Cepu. Dijelaskan, di Blok Cepu, posisi tertinggi diduduki Joint Operation Committee (JOC) atau Komite Operasi Bersama dengan Pertamina sebagai ketuanya.

"GM (general Manager) tidak punya satu pun prerogatif. Tanpa ada persetujuan dari JOC, satu dolar pun tidak bisa dikeluarkan. JOC itu komposisinya 50:50 dan ketuanya Pertamina. Dan di sana ada *balancing power*, mayoritas orang Indonesia duduk disitu," ujar Sugiharto yang dicegat wartawan di Kantor Kepresidenan, Jln. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa

(14/3/2006). Dalam penjelasan saat konferensi pers soal kesepakatan Blok Cepu disebutkan, Komite Operasi Bersama merupakan pihak yang berwenang membuat maupun memutuskan perencanaan operasi, rencana program kerja dan anggaran, persetujuan pengeluaran maupun pelaksana kegiatan operasi Blok Cepu.

PT Pertamina EP Cepu (PT PEPC) dan Mobil Cepu Limited (MCL) akan menempatkan masing-masing tiga orang perwakilan dalam komite tersebut. Komite Organisasi Bersama ini akan membawahi organisasi Proyek Cepu. Nah, di organisasi Proyek Cepu ini terdiri atas General Manager yang dipegang MCL dengan wakilnya dari PEPC. Sementara manager dibagi rata untuk PEPC dan MCL.

"Karena ini adalah 50:50 *joint venture* maka development Cepu harus dilakukan oleh kedua *partner* secara *pari pasu*.... Pertamina harus cari *the dream team* untuk develop Blok Cepu, bukan sendiri-sendiri. GM-nya dia, DGM-nya kita, Operation manager dia, planning manager kita," ujar Sugiharto.

Sugiharto pun mengakui bahwa dari sisi teknologi, ExxonMobil lebih mampu sehingga pemerintah tak mau mengambil risiko. Karena dengan karakteristik minyak yang *high risk* dan *high return*, jika penanganannya salah maka akan menimbulkan kerusakan di bawah bumi.

Kebohongan publik
Sementara itu Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC) yang terdiri dari beberapa komponen antara lain

Batubara mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk membatalkan penandatanganan JOA antara ExxonMobil dan Pertamina. GRPBC pun mendesak agar DPR RI menggunakan hak angketnya untuk mengusut pelanggaran dalam negosiasi Blok Cepu tersebut.

Marwan mengungkapkan pemerintah telah melakukan kebohongan publik dengan menyatakan negosiasi Blok Cepu dilakukan secara B to B (*Business to Business*). Tapi pada kenyataannya, pemerintah terus menekan Pertamina untuk memperpanjang kontrak hingga 2030. Selain itu, pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Cepu kepada ExxonMobil.

"Jika dilakukan B to B, seharusnya telah selesai sejak tahun 2002. Ini membuktikan pemerintah telah takluk dan tidak memiliki keberpihakan untuk membangun kemandirian bangsa di sektor energi. Padahal Blok Cepu merupakan aset bangsa dengan potensi cadangan minyak mencapai 2,6 miliar barel, serta cadangan gas bumi sebesar 11 triliun kaki kubik," ungkap Marwan.

Sementara itu, Ketua DPR RI Agung Laksono mengatakan DPR tidak berada dalam menyikapi blok Cepu yang operatornya ExxonMobil, Namun DPR akan melakukan pembahasan khusus untuk memperoleh masukan mengenai perkembangan terakhir persoalan Blok Cepu itu. Dalam waktu dekat, kata Agung, DPR akan melakukan pertemuan dengan menteri-menteri terkait menyangkut perkembangan Blok Cepu tersebut. (A-109/A-130/Ant)***

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, anggota DPR RI, serta lembaga swadaya lainnya, di Jakarta, Selasa (14/3) menilai pemerintah telah melakukan kebohongan publik karena operator pengelolaan migas Blok Cepu akhirnya diserahkan kepada ExxonMobil dan bukan kepada Pertamina. "Dengan demikian, rencana penandatanganan joint operation agreement (JOA) antara ExxonMobil dan Pertamina harus ditolak," ujar Ami Taher anggota DPR RI yang bergabung dalam GRPBC. Menurut dia, pihaknya prihatin atas keputusan yang akhirnya menyerahkan operator pengelolaan Blok Cepu kepada ExxonMobil. Pasalnya, ada rekayasa dari pemerintah untuk memenangkan perusahaan asing asal AS tersebut.

Koordinator GRPBC yang juga anggota DPR RI, Marwan

53

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 27 TAHUN 2006	

BUS TRANSJAKARTA

**Stasiun Pengisian BBG
Tidak Memenuhi Standar**

JAKARTA, KOMPAS. — Sopir-sopir bus transjakarta koridor II Pulo Gadung-Harmoni mengeluarkan, stasiun pengisian bahan bakar gas yang terdekat dengan Terminal Pulo Gadung, di Jalan Pemuda, belum memenuhi syarat tekanan gas. Dampak yang ditimbulkan, mereka sering mengantre karena pengisian menunggu penambahan tekanan BBG.

"Sebetulnya sudah disampaikan bahwa stasiun pengisian BBG di Jalan Pemuda itu untuk kendaraan bus kecil atau taksi dengan tekanan tiga sampai empat bar. Tetapi, saya terpaksa tetap membeli BBG dari tempat itu meskipun sering antre untuk menunggu tekanan dinaikkan sampai enam bar," kata seorang sopir yang enggan disebutkan namanya, Selasa (14/3) di Terminal Pulo Gadung.

Saat ini stasiun pengisian BBG yang pas untuk bus besar seperti bus transjakarta ada di Kalideres. Tekanannya hingga sembilan bar.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Nurachman, pembuatan stasiun pengisian BBG di Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Terminal Pulo Gadung kini masih diupayakan dengan menambah jaringan pipa oleh PN Gas.

"Ketika angkutan umum berbahan bakar gas siap di Jakarta, stasiun-stasiun pengisian BBG diharapkan memenuhi kebutuhan ini. PN Gas seharusnya dapat melihat peluang investasi ini," katanya.

Salah satu petugas operator bus transjakarta koridor II dari PT Transbatavia menyebutkan, dampak BBG yang tidak memenuhi standar akan merusak mesin dan menimbulkan biaya operasional tinggi. Terhitung dengan bahan bakar solar bus mencapai 2,15 kilometer per liter (seharga Rp 4.300), sedangkan dengan BBG tidak standar tercapai 1,3 kilometer per liter BBG setara dengan premium (seharga Rp 3.000). (NAW)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN - FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 19		TAHUN 2006

Hasil Akhir Blok Cepu Dikecam

Analisis Menilai Bisa Menjadi Sentimen Positif Investasi

JAKARTA, KOMPAS – Keputusan pengelolaan Blok Cepu secara kolektif dengan ExxonMobil bertindak sebagai operator mendapat reaksi dari berbagai pihak. Kesepakatan tersebut dinilai belum mencerminkan proporsi yang maksimal bagi tenaga ahli lokal dalam menduduki posisi kunci.

Di Jakarta para profesional perminyakan yang tergabung dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), Rabu (14/3), menyatakan bahwa posisi General Manager dan Deputi serta Manajer dan Wakil Manajer tidak lazim dalam praktik perminyakan. Di Solo mahasiswa Universitas Sebelas Maret juga menggelar aksi protes atas posisi GM yang dipegang ExxonMobil.

Namun, pihak pemerintah menyatakan tidak ada pihak yang memiliki hak prerogatif dalam struktur organisasi Blok Cepu. Menteri Negara BUMN Sugiharto menegaskan bahwa meskipun ExxonMobil memegang jabatan GM, namun tidak memiliki hak prerogatif untuk menentukan segala-galanya dalam pengelolaan Blok Cepu itu. ExxonMobil hanya pelaksana. "Tidak ada yang punya hak

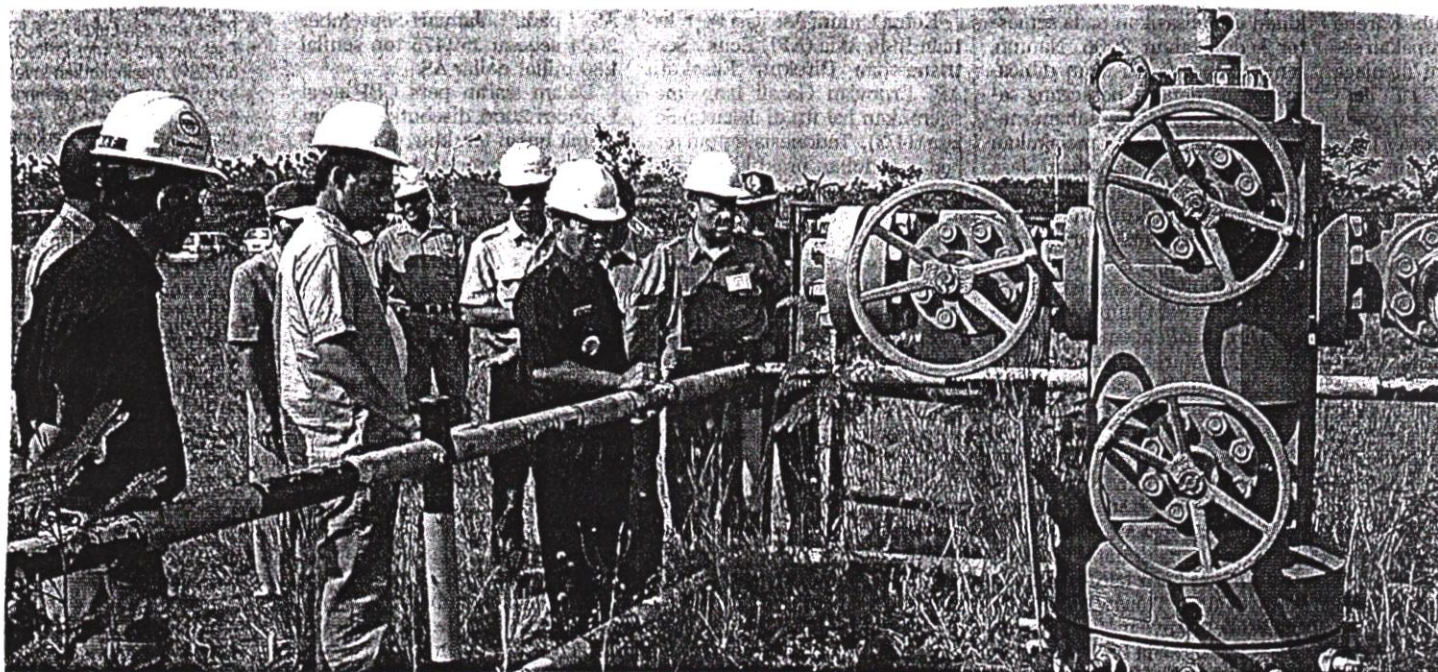
prerogatif. Manajemen menjalankan program kerja yang sudah direncanakan sebelumnya. Tidak ada satu dollar AS pun yang bisa dikeluarkan tanpa pengawasan oleh BP Migas," ujar Sugiharto. Sugiharto mengatakan seluruh kegiatan pengelolaan Blok Cepu akan diputuskan oleh Komite Operasi Bersama, yang terdiri atas ExxonMobil dan Pertamina. "Ketua Komiteya Pertamina. Jadi, keliru kalau GM punya prerogatif. Tak ada yang bisa dikeluarkan GM, tanpa persetujuan komite. Juga ada keseimbangan berdasarkan kekuatan manajemen yang didominasi orang Indonesia," ujar Sugiharto.

Positif bagi investor
Sementara itu, se usai mepena kunjungan Menlu AS Con-

dolezza Rice di Jakarta, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengatakan, Menlu AS itu tidak secara spesifik menanyakan masalah pengamanan investasi AS di Indonesia. Rice juga tidak membahas masalah mikro, termasuk soal Blok Cepu. "Ini pertemuan tukar pikiran. Tentunya, kami sampaikan yang penting bagi kita, dan yang mungkin bisa didukung oleh AS seperti dalam hal investasi," katanya. Analisis menilai, hasil Blok Cepu ini sebagai sentimen positif untuk investasi di Indonesia. Vice President Investment Banking Yulie Sekurindo Hendra Bujang mengatakan, pengumuman kesepakatan tersebut akan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu tempat yang positif untuk berinvestasi. "Saya kira ini informasi bagus, tetapi yang penting kepastian hukum dan regulasi di Indonesia harus berjalan. Jadi, jangan nanti ganti pemerintah akan ganti regulasi," katanya. Optimisme juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang secara administratif membawahi wilayah Blok Cepu. Bupati Bojonegoro M Santoso mengemukakan, pihaknya mengharapkan segera dilibatkan dalam pengelolaan Blok Cepu. Berdasarkan kontrak kerja sama Pertamina dan ExxonMobil disepakati bahwa keduanya memberikan bagian 10 persen kepada pemerintah daerah. Bagian itu dibagi untuk Pemprov Jawa Timur dan Jawa Tengah, Pemkab Bojonegoro, dan Pemkab Blora. (DOT/HAR/INU/OIN/TAV/LIA/EKI)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 17											TAHUN 2006																			



ANTARA/AGUK SUDARMOJI

Sumur minyak di Banyuurip di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngsem, Bojonegoro, Jatim, yang termasuk dalam Blok Cepu saat ditinjau Bupati Bojonegoro, HM Santoso, beberapa waktu yang lalu. Kesepakatan Blok Cepu menyetujui kerja sama operasi dengan ExxonMobil sebagai operator dan Pertamina sebagai wakilnya. Produksi minyak dijadwalkan Oktober 2009.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA			<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>								
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM							
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 7											TAHUN 2006

India amankan pasok energi

Setelah mencapai kesepakatan soal nuklir dengan AS yang dianggap kontroversial, India membuat gebrakan baru dengan mengamankan sektor energinya melalui pembangunan jaringan pipa gas dari Iran melalui Pakistan.

Untuk itu pertemuan pertama antara tiga pihak digelar di Teheran, Iran yang menyepakati tiga hal, yaitu harga gas, struktur proyek, dan kerangka persetujuan sebelum dibawa ke tingkat menteri bulan depan. Kenapa Iran, India, dan Pakistan melangkah begitu cepat?

Mereka sudah membayangkan akan adanya sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran yang bersikeras melanjutkan program nuklir. Minat besar India terhadap kesepakatan energi itu dapat dipahami. New Delhi butuh dukungan energi yang besar untuk

menggerakkan laju ekonominya.

Presiden Bush pun menyatakan kekagumannya atas kebutuhan energi India yang begitu besar. Dalam kaitan itu, New Delhi meminta AS agar lebih bersikap lunak terhadap masalah non proliferasi nuklir, apalagi bagi program nuklir yang nyata-nyata untuk kepentingan sipil.

Jangan lupa, mempengaruhi satu miliar orang dalam konteks demokrasi di India adalah suatu hal yang 'menantang' bagi Washington. Apalagi Gedung Putih memandang New Delhi merupakan 'pesaing' Beijing. Tapi Iran cenderung ingin mempertahankan hubungan tradisionalnya dengan India melalui proyek jalur pipa gas tersebut.

• *The Business Times*, 14 Maret

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : <i>B12</i>											TAHUN 2006																			

China batasi impor bijih besi

BLOOMBERG

SHANGHAI: Negara produsen baja terbesar di dunia, China, akan membatasi impor bijih besi dari pasar global. Hal itu disebabkan terjadinya peningkatan harga yang dikendalikan kalangan pemasok yang dapat merusak kerja sama jangka panjang antarkedua pihak.

Kementerian Perdagangan China menyatakan larangan sementara impor bijih besi itu telah sesuai dengan yang diperkirakan sebelumnya. Namun, lembaga pemerintah itu tidak merinci lebih jauh jangka waktu dan sebera-

pa besar pembatasan impor bijih besi tersebut.

Sejumlah produsen baja China seperti Baosteel Group Corp, tahun ini disebutkan tidak melakukan negosiasi harga bijih besi dengan pemasok komoditas ini. Kondisi itu terjadi setelah harga bijih besi mencapai rekor tertinggi pada 2005 dan mengikis laba produsen.

Perusahaan tambang Vale do Rio Doce, BHP Billiton, dan Rio Tinto Group diketahui akan meningkatkan harga bijih besi tahun ini, menyusul adanya peningkatan permintaan China.

China mengimpor sekitar 44% dari total produksi bijih besi dunia. Vale do Rio Doce, BHP Billiton, dan Rio Tinto Group memasok sekitar 75% dari jumlah tersebut. Harga yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dijadikan patokan harga global.

Harga bijih besi tahun lalu telah meningkat 71,5% akibat naiknya permintaan komoditas China. Kumba Resources Ltd, produsen bijih besi terbesar keempat di dunia, memperkirakan harga komoditas itu pada tahun ini naik sebesar 10%. (RRU)



Massa Hizbut Tahrir yang mendemo gedung Kedubes AS, membentangkan spanduk menolak perusahaan Amerika: Freeport dan ExxonMobil menjarah hasil bumi Indonesia. Foto: Sophan

dengan kenaikan TDL yang terus menggilai.

"Kasus di Aceh adalah contohnya, Exxon membiarkan Pupuk Iskandar Muda (PIM) tutup, padahal lapangan gas Arun itu gasnya melimpah. Dan kita sendiri nggak bisa apa-apa, akhirnya harus *swap* dari Pupuk Kaltim. Harusnya ini jadi pelajaran," ujar Panji.

Lebih lanjut Hendri menyata-

kan, mestinya kebijakan menaikkan TDL harus dihindari karena jelas akan menambah beban masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi riil. "Jangan ada kenaikan TDL, karena jelas akan sangat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat," tegas Hendri.

Dia juga meminta agar pemerintah tidak konservatif dalam

melakukan kebijakan ekonomi. "Selama ini kan yang dilakukan adalah menjaga defisit anggaran dengan cara melakukan privatisasi dan mencabut subsidi. Ini adalah paradigma konservatif yang harus ditinggalkan karena tidak pro kepada rakyat. SBY-JK harus bikin terobosan yang tidak akan mengganggu kesejahteraan rakyat banyak," kritik Hendri. ■ IU

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A-9

TAHUN 2006

Bensin Langka Akibat Salah Informasi

MEDAN — Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Medan, Sumatera Utara, kehabisan stok. Kelangkaan bahan bakar bensin yang berlangsung sejak Senin hingga kemarin itu akibat kesalahan informasi pengiriman pasokan oleh petugas di depot Dumai.

Menurut juru bicara Pertamina Wilayah I Sumatera Utara, Joko Sasono P., kelangkaan itu disebabkan oleh adanya kendala teknis pengiriman dari depot Pertamina di Dumai. "Ada masalah pada skedul pengiriman," kata Joko kemarin.

Dia menjelaskan, kendala teknis yang dimaksud adalah kesalahan informasi permintaan pengiriman. Permintaan premium dari Pertamina Medan kepada petugas depot Dumai ternyata bukan bensin yang dikirim, tapi solar dan minyak tanah. Padahal stok solar di Labuhan Deli dan Belawan cukup banyak, sekitar 20 ribu ton.

Permintaan bensin langsung dilayangkan. Namun, karena perjalanan kapal memakan wak-

tu cukup lama, krisis bensin di Medan tak segera teratasi. Mestinya, menurut Joko, kapal masuk Medan pada Minggu lalu, tapi terlambat mendarat di Labuhan Deli hingga Senin malam.

"Stok bensin waktu itu sudah sangat menipis, cuma sekitar 2.000 ton. Tak mungkin premium ini didistribusikan ke pompa bensin di seluruh Medan," ungkap Joko seraya menambahkan telah meminta tambahan pasokan bensin dari Riau dan Pontianak.

Berdasarkan pantauan *Tempo*, sedikitnya 5 stasiun pengisian bahan bakar umum kehabisan stok. Beberapa pompa bensin yang masih menjual premium diserbu pembeli dan mengakibatkan antrean panjang.

Andi Ginting, pengawas pompa bensin di Jalan Gajah Mada, mengaku sudah mengirim dua truk tangki untuk antre premium di depot Belawan. Ginting terpaksa tidak melayani pembelian bensin kepada pelanggan sejak Senin malam lalu. ● HAMBALI BATUBARA